

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SIDIANGKAT  
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Siti Abidah Lubis**

**NIM. 13154032**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”, An. Siti Abidah Lubis telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah pada tanggal 15 November 2019, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Muaz Tanjung, MA**  
NIP. 19661019 200501 1 003

**Dr. Salamuddin, MA**  
NIP. 19740719 20070 1 014

### Anggota Penguji:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. <b>H. Darwin Zainuddin, MA</b><br>NIP. 19591231 199803 1 010     | 1..... |
| 2. <b>Dra. Nasrilla MG, MA</b><br>NIP. 19640703 199003 2 001        | 2..... |
| 3. <b>H. M. Iqbal A. Muin, Lc, MA</b><br>NIP. 19620925 199103 1 002 | 3..... |
| 4. <b>Dr. H. Muaz Tanjung, MA</b><br>NIP. 19661019 200501 1 003     | 4..... |

### Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUMATERA UTARA

**Dr. Soiman, MA**  
NIP. 19660507 199403 1 005

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Abidah Lubis

NIM : 13154032

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 28 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

Siti Abidah Lubis

NIM: 13154032

## **ABSTRAK**

Nama : Siti Abidah Lubis

Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh Umat manusia. Shalawat dan salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada umatnya yang selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman.

Dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan SKRIPSI ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang orang tua penulis yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis mulai dari kecil hingga sampai sekarang ini dengan penuh kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, memberikan bantuan moral dan materi, pengorbanan serta dukungan yang sangat besar terhadap saya dan terimakasih juga kepada abang dan kakak yang telah mendukung saya sampai sekarang ini.
2. Kemudian ucapan terima kasih tak henti-hentinya di curahkan kepada keluarga terdekat penulis karena dengan doa dan dorongan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Untuk Ahmad Muhajir Batubara yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyelesaikan skripsi ini berkat arahan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta staf-stafnya
2. Bapak Dr.Soiman, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Bapak Dr.H.Muaz Tanjung, MA. selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan juga Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak H.M. Iqbal A. Muin, Lc, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini terselesaikan.
5. Abangda Bahtra Sigalingging selaku koordinator PKH Dairi yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dan juga memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
6. Abangda Kurnia Sihotang selaku pendamping PKH yang telah banyak membantu untuk turun langsung kelapangan dan juga sudah memberikan informasi tentang PKH kepada saya.
7. Kepada Bapak Mawardi S Tumangger, S.AP selaku lurah di Desa Sidiangkat yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dan juga memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
8. Kepada masyarakat Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang telah bersedia menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah
9. Teman-teman sekelas PMI A Stambuk 2015 yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan Proposal ini. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan balasan yang terbaik kepada semuanya.

10. Dan seluruh teman-teman sekalian yang mana mungkin penulis tidak menyebutkan kalian satu persatu tapi yakinlah kalian juga merupakan bagian terpenting bagi penulis (penulis tidak akan melupakan kalian semua).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan masukan serta saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon ampun dan perlindungannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb..*

Medan, 26 Agustus 2019

Penulis

Siti Abidah Lubis

NIM. 13154032



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
-----------------------------	---

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
-------------------------	----

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Peran .....	10
B. Pengertian Pemberdayaan .....	11
C. Pengertian Masyarakat .....	14
D. Pemberdayaan Masyarakat .....	15
E. Teori Pemberdayaan Masyarakat .....	23
F. Pengertian Kemiskinan .....	28
G. Kajian Terdahulu .....	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Subjek Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Instrument Penelitian .....	35
F. Teknik Analisi Data .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Bentuk Kegiatan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- B. Hambatan Pemerintah dalam Melaksanakan PKH
- C. Solusi Pemerintah dalam PKH

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN :**

### **DAFTAR WAWANCARA**

### **SURAT RISET**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus kemiskinan,

dimana hampir disetiap daerah angka kemiskinan meningkat dikarenakan faktor ekonomi.<sup>1</sup>

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memprihatinkan. Kenyataan ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya generasi yang hilang beberapa dasawarsa mendatang.

Kesejahteraan pada umumnya merupakan dambaan bagi setiap manusia yang hidup didunia. Tidak ada satu manusia pun yang lahir kedunia ini ingin hidup dalam keadaan miskin pastilah semua ingin hidup sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang yang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan dalam konsep Islam menurut Imam Al-Ghozali terpenuhinya 5 (lima) unsur pokok yaitu demi menjaga keyakinan agamanya, memelihara jiwanya, keturunannya, harta bendanya serta akal atau fikirannya. Islam sangat menganjurkan kepada ummatnya agar selalu berusaha demi meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/garis> kemiskinan Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016

hidupnya. Dalam hal ini Allah menegaskan didalam Al-Quran surah Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

Artinya :“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada perlindungan bagi mereka selain Dia”.

Salah satu program bantuan itu ialah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Desa Sidiangkat. Program Keluarga Harapan ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas : Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat peran Dinas Sosial yang menjadi aktor dalam menyukseskan PKH. Dinas Sosial yaitu suatu unit pemerintahan dibidang

sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Peran Dinas Sosial tidak jauh beda dengan peran pekerjaan sosial, yaitu membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Di dalam Peran Dinas sosial ini, ada program pemerintah yang dapat langsung turun ke masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan merupakan program dari pemerintah yang pelaksanaannya pun masih belum melalui proses dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Selain manajemen yang baik, peran Dinas Sosial sangat perlu diperhatikan dalam program ini, karena melalui peran ini dapat diketahui seberapa tolak ukur pencapaian program.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi, dengan mendirikan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa-desa. Hal ini bertujuan untuk

mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Dairi adalah mendirikan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang. Keberadaan program tersebut didirikan berdasarkan angka urbanisasi yang tinggi serta tinggi kesejahteraan keluarga yang jauh dari cukup.

Melihat permasalahan yang terjadi, bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk masyarakat Kecamatan Sidikalang melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pelatihan tersebut agar dapat diketahui peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan keluarga agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat, untuk itu penulis mengajukan dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini yang akan dilakukan bisa terarah dan fokus dalam kajian yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana hambatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana solusi pemerintah Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.



2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat karya ilmiah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang Program Keluarga Harapan dan lebih memahami tentang pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui pemberian program dinas sosial yang melalui program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat rumah tangga sangat miskin (RTSM).

4. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui bahwa dengan adanya peran dinas sosial dapat membantu berjalannya program keluarga harapan dengan baik dan mencapai keberhasilan program dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik.

**E. Batasan Istilah**

1. Peran berarti laku atau bertindak. Secara etimologi peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Friedman, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>3</sup>
3. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>4</sup>
4. Penanggulangan kemiskinan yaitu membantu keluarga miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan cara yang terjangkau, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga sasaran, khususnya dalam bidang ekonomi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan secara mandiri, dan mengembangkan kemampuan keluarga sasaran agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.<sup>5</sup>
5. Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu.

---

<sup>3</sup> Zubaidi, "*Pengembangan Masyarakat*", (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2013), hlm.24.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 320

<sup>5</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1986), hlm. 228

## **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub bab, berikut sistematikanya :

Bab I, merupakan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah.

Bab II, merupakan Landasan Teori yang membahas tentang Pengertian Peran, Pengertian Pemberdayaan, Pengertian Masyarakat, Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengertian Kemiskinan.

Bab III, merupakan tentang Metode Penelitian, yang berisi lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, Instrument penelitian, dan teknik analisis data

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dinas Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **a. Dinas Sosial**

###### **1. Pengertian Dinas Sosial**

Dinas Sosial yaitu suatu unit pemerintahan dibidang sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, Dinas Sosial Kabupaten Dairi terletak di Jl. Sentosa, Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Kedudukan Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Dairi antara lain :

1. Membantu meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami
2. Melaksanakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sosial
3. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitas sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.<sup>6</sup>

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”<sup>7</sup>

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

---

<sup>6</sup> Dasril Arifin, Skripsi : ”Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak” (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm.21

<sup>7</sup><http://dinsos.jatengprov.go.id/peraturan-perundangan/undang-undang-tentang-kesejahteraan-sosial> (diakses pada 2 April 2018 pukul 10:56)

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sosial, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial**

### **1. Visi Dinas Sosial**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial adalah Memandirikan Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan Masyarakat.

Makna dari visi yang dimiliki tersebut adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk

menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tujuan dari penetapan Visi adalah menjadi :

- a. Cerminan apa yang ingin dicapai dimasa depan
- b. Arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Perikat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Orientasi terhadap masa depan
- e. Komitmen semua jajaran dalam lingkungan Organisasi
- f. Jaminan kesinambungan kepemimpinan Organisasi

2. Misi Dinas Sosial yaitu :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Dinas Sosial mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Suatu pernyataan misi secara eskplisit dinyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah dan kegiatan Spesifikasi apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Instansi Pemerintah terhadap rakyat.



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial maka telah dirumuskan dan diterapkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kabupaten Dairi.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan penempatan dan perluasan kerja, pelatihan kerja, dan produktivitas kerja dalam rangka menekan pengangguran.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja serta pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi jumlah masalah kesejahteraan sosial masyarakat.

### **3. Tujuan Dinas Sosial**

Adapun tujuan dari Dinas Sosial sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang

memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.

- c. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

#### **b. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan .PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. (PKH, 2008 : 1) Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2007 dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah : Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Program Keluarga Harapan ini telah menyebar diberbagai daerah khususnya di Sumatera Utara yaitu, di Nias, Kabupaten Tapteng, Samosir dan dikota Medan.

### **1. Tujuan PKH**

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompo masyarakat sangat miskin.

Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutuskan rantai kemiskinan antargeresasi (PKH, 2008:1).

### **2. Lembaga Pendukung PKH**

Dalam pelaksanaan PKH terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program tingkat provini, dan PT.Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan menyampaikan bantuan ketangan penrima manfaat langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaa kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan,

### **3. Sumber Dana PKH**

Sumber dana yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

APBN adalah suatu daftar secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. APBN bertujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan Negara agar terjadi keseimbangan dinamsi, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>8</sup>

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai :

Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan

---

<sup>8</sup> Irma Irawan, Skripsi : *“Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Di Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan”* (Medan, IAIN SU, 2012), hlm.9-11

dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.<sup>9</sup>

Pemberdayaan menurut banyak pemikir mengartikannya sebagai konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa. Konsep ini telah meluas diterima dan digunakan, dengan pengertian, dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Definisi pemberdayaan menurut dari pengertian tersebut, makna pemberdayaan adalah :

1. Memperbesar peluang dalam melakukan pilihan-pilihan ekonomi dan politik
2. Meningkatkan derajat kebebasan seseorang atau suatu komunitas tertentu dalam mengembangkan kehidupannya
3. Meningkatkan kapasitas dalam penguasaan sumber daya ekonomi
4. Memiliki posisi dan kewenangan lebih besar dalam menentukan sesuatu.

Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat. Artinya, pemberdayaan meliputi upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.89

<sup>10</sup> Owin Jamasy, *Keadilan Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : Belantika,2004), hlm.25.

Selanjutnya dikatakan juga, bahwa pemberdayaan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah melalui cara memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan masyarakat yang masih tertinggal dalam tiga aspek yakni :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi lapisan masyarakat itu berkembang
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
3. Mengembangkan perlindungan bagi si lemah, artinya mencegah persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan, dan mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>11</sup>

Menurut Mardikanto “2014:202”, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

---

<sup>11</sup> Edy Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Adimata, 2005), hlm.78

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”. Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraanusaha.
2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”. Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>12</sup>

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian

---

<sup>12</sup> <https://www.dosenpendidikan.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan/> (diakses pada 2 Februari 2019 pukul 11:07)

sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

#### **b. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti, sekolah, keluarga, perkumpulan.

Menurut Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Kemudian Ralph Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Ciri-ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama menurut Soerjono Soekanto (1982) adalah sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang



harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.

- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah system komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, berarti masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia semata tanpa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu sama lainnya.

---

<sup>13</sup> Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung : Pustaka Jaya,1995), hlm.47

### c. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Didalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-13 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya persatuan umat Islam dalam memberdayakan masyarakat, yaitu:

- a. Menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain agar bisa memperdayakan masyarakat sekitar.
- b. Menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain, dan tidak menghina pekerjaan yang dilakukan masyarakat sekitar.
- c. Menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain.

Dan dalam ayat ini juga, Allah menerangkan bahwa semua manusia dari satu keturunan, maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Dan Allah juga menjelaskan bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong sesamanya. Yang telah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوعًا وَقَوَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱۳)

Artinya : (11). Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim. (12). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (13) Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>14</sup>

Para ilmuawan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada defenisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>14</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraqhi*, (Semarang : CV Toha Putra, 1988), hlm. 132

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ite mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti member daya, member “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Averroes menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat karena praktiknya saling tumpang tindih, pada bagian lain, Suvejo dan Supriyaanto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu persatuan utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat local antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial, dan ekologi.

Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial, dan ekologinya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development.

Seperti yang dilaporkan Dekiveri dalam Subejo dan Supriyanto, proses pemberdayaan masyarakat semestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu eksternal faktor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim dalam proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antar tim PM dan warga masyarakat. Berdasarkan beberap pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran tim PM dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah dimulai tahap sosialisasi.<sup>15</sup>

## **1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implementasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*).Terkait dengan hal ini, pembangunan apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan

---

<sup>15</sup> Totok Mardikanto &Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabets,2017), hlm.44-46

pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya.<sup>16</sup>

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi efektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.109

masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Memacu kepada konsep-konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada, perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*). Dengan berbekal dengan kebaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

5. Perbaiki usaha (*batter business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas dapat memperbaiki pendapatan yang memperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*batter community*). Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkaran (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>17</sup>

## **2. Teori Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Teori**

Sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu (contoh : masyarakat, organisasi, atau kelompok populasi tertentu).

Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungkap menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu *Deductive Theory Construction* yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan diawal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Pendekatan kedua yaitu *Konstruktive*

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.111-112



*theory* yaitu teori yang belum ada atau masih di duga dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat.

## **b. Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat**

### **1) Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)**

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli ( *The Prince* , awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes ( *Leviathan* abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (*equality*), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (*power relations*) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori

ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

## **2) Teori Konflik**

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik.

Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila

hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budayatidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.<sup>18</sup>

### **C. Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Adapun hadist tentang kemiskinan yaitu

كا د الفقر ان يكون كفرا

Atinya: kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran (HR Abu Dawd).

---

<sup>18</sup> <https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>  
(diakses 05 Juli 2015, pukul 11:40)

<sup>19</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm.1-2

Fakir miskin bukanlah suatu kasta kemiskinan dalam Islam bukan suatu yang abadi. Tetapi sebuah perjalanan yang berpindah tempat, bersembunyi dan akhirnya menghilang. Sementara fakir miskin tiada lain adalah individu-individu yang kadang-kadang hari ini miskin hari esok kaya, sebab berbagai pintu peluang dan kesempatan terbuka terus bagi semua orang.<sup>20</sup>

Kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sebagai kelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur. Garis kemiskinan, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal : (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2) posisi manusia di dalam lingkungan sekitar, dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <https://maqalah2.blogspot.com/2015/02/tafsir-ayat-ayat-tentang-fakir-miskin.html> (diakses 02 2015, pukul 18:10)

<sup>21</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.789

Kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (*self employed*) berusaha apa saja.
5. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.<sup>22</sup>

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar.<sup>23</sup>

Adapun tujuan dari penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Membantu keluarga miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan cara yang terjangkau.

---

<sup>22</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1986), hlm. 228

<sup>23</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 808-809

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga sasaran, khususnya dalam bidang ekonomi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan secara mandiri.
- c. Mengembangkan kemampuan keluarga sasaran agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki
- d. Meningkatkan akses keluarga miskin untuk mendapatkan modal, teknologi, dan memiliki usaha yang tetap, serta akses untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Menumbuhkan dinamika sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan secara gotong-royong oleh masyarakat
- f. Memperkuat kondisi dan keterpaduan di antara unsur-unsur yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.<sup>24</sup>

#### **D. Kajian Terdahulu**

Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelum-sebelumnya. Sejangka peneliti melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah sudah pernah dikaji secara khusus dalam sebuah karya ilmiah.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.815-816

Maka peneliti meninjau penelitian-penelitian terdahulu diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati Jurusan Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pendampingan program keluarga harapan (PKH). Penulis juga menyimpulkan bahwa peran pendamping terbagi menjadi empat diantaranya adalah : 1) Peran dan keterampilan fasilitatif, bahwa pendamping telah melakukan perannya sebagai fasilitator dengan membantu informasi, motivasi serta membantu pengorganisasian peserta PKH yang sangat dibutuhkan untuk peserta PKH. 2) Pendamping telah memenuhi perannya sebagai pendidik. Hal yang dilakukan pendamping sebagai pendidik yaitu pada saat pertemuan kelompok *Family Development Sessions* (FDS). 3) Peran dan keterampilan representasi/perwakilan masyarakat dengan mendatangi layanan-layanan eksternal seperti puskesmas, posyandu, dan sekolah untuk kepentingan peserta PKH. Pada pendamping di Kecamatan Semarang Tengah juga menemukan kendala-kendala. Faktor Internal yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas dana atau formulir pemutakhiran. Selain itu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu. Selain faktor penghambat, ada pula faktor

pendukung dalam proses pendampingan meliputi dukungan dari masyarakat penerima bantuan dan ibu-ibu yang rajin hadir. Serta alat bantu pendampingan berupa buku yang berisi materi yang sangat membantu dalam penyampaian *Family Development Sessions* (FDS).<sup>25</sup>

2. Penjelasan penelitian terdahulu penulis paparkan sebagai pembanding untuk penelitian yang dilakukan saat ini sehingga menjadi referensi dan pembanding untuk penulisan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian yang dipaparkan oleh penulis diatas, penelitian ini membahas Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan berfokus kepada sosial ekonomi

---

<sup>25</sup><https://lib.unnes.ac.id/29800/1/1201413087.pdf> (diakses pada 08 2017 pukul 14:10)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa yang bertepatan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena kegiatan ini berperan untuk penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Menurut Andi Prastowo (2011: 181) menjelaskan pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengandalkan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan berupaya mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para anggota yang melakukan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu ada informasi pelengkap yaitu warga yang mengikuti Program Keluarga Harapan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Jumlah subjek penelitian ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan beberapa alat pengumpulan data, adapun alat pengumpulan data tersebut adalah :

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Kencana,2017) hlm 372

Proses wawancara dilakukan dalam lima tahapan:

- a) Menentukan informasi yang akan diwawancarai
  - b) Mempersiapkan kegiatan wawancara, daftar wawancara, sifat pertanyaan, alat bantu, menyesuaikan waktu, dan tempat serta membuat janji
  - c) Langkah awal menentukan fokus permasalahan, membuat pertanyaan-pertanyaan pembuka (bersifat terbuka dan terstruktur) dan mempersiapkan catatan sementara
  - d) Pelaksanaan melakukan wawancara sesuai dengan persiapan yang dikerjakan
  - e) Menutup pertemuan
2. Observasi atau pengamatan adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu, atau menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih. Observasi yang menulis maksudkan disini adalah untuk mengumpulkan data yang di perlukan, penelitian mengadakan observasi secara langsung di lapangan.<sup>27</sup>
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dengan menginpestasi dokumen-dokumen yang relapan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 384

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.391

## E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Alasan
1	Drs. Erwin Sihotang	Sekretaris Dinas Sosial	Karena beliau selaku sekretaris di Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang mewakili peran Program Dinas Sosial
2	Bahtra Sigalingging	Koordinator Program Keluarga Harapan	Karena beliau selaku koordinator PKH di Kabupaten Dairi
3	Mawardi Tumangger, S.AP	Lurah di Sidiangkat	Selaku lurah di Sidiangkat dan dapat memberikan informan
4	Kurnia Sihotang	Pendamping PKH	Karena beliau selaku pendamping PKH di Sidiangkat
5	Meriyati Hutahuruk	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
6	Maidah Berutu	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
7	Relida Sinaga	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
8	Nurhainim Solin	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
9	Emeria Banurea	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
10	Yenni Pasaribu	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat

11	Diana	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat
12	Relida Sinaga	Penerima Bantuan PKH	Masyarakat Sidiangkat

## **F. Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data**

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengelola data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang di dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri atas.

### 1. Reduksi data

Merupakan proses penelitian, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data langsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah di peroleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah

ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama diakhir penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat.<sup>29</sup>

#### 4. Triangulasi

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri.<sup>30</sup>

Tipe-tipe triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi data yang penggunaan beragam sumber data penelitian
2. Triangulasi penelitian yaitu menggunakan beberapa penelitian yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian
3. Triangulasi teknik metodologis yaitu penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian.

Pada tahap ini merupakan tahap untuk mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan data pendukung lainnya untuk lebih memahami penelitian atas fenomena yang diteliti.

Analisis data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja dengan data, mengorganisasikannya serta memilikilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menentukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Kencana,2017) hlm.407-409

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.411

Adapun teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi Burhan Bungin menjelaskan bahwa hal ini dapat tercapai dengan cara yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan ini suatu dokumen yang berkaitan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 265

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Sonta Purba, SE	19600421 198103 2 003	Kepala Dinas
2	Drs. Erwin Sihotang	19669107 198603 1 002	Sekretaris
3	Ati Tumanggor	19631018 198903 2 003	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4	Lolyta E. A.Ampun, SE	19781025 200604 2 015	Kasubbag. Keuangan dan Aset
5	Tiomsihombing, S.Kom	19800225 201001 2 021	Kasubbag. Perencanaan Prog Dan Pelaporan
6	Drs. Marsius Sitorus, M.Si	19681103 199402 1 001	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Tiarmauli siahaan, S.Psi	19680601 199703 2 003	Kabid. Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
8	Drs. Panoguan	19630324 199203 1 003	Kabid. Pemberdayaan dan



	Malau		Rehabilitasi Sosial
9	Jemelita Nababan, SH	19780405 199803 2 002	Kasi. Perlindungan Dan Jaminan Sosial
10	Mawar Nababan	19641225 198611 2 002	Kasi. Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat
11	Ellisda Ujung, SH	19740308 199402 2 002	Kasi. Rehabilitasi Penyandang Cacat Dan Tuna Sosial
12	Juara N.E Sihite, ST	19780611 201001 1 016	Kasi. Pengelolaan Dan Sumber Dana Sosial
13	Amhar Sagala	19650507 198903 1 002	Kasi. Pengelolaan Data Dan Informasi
14	Ramli Padang	19690723 198903 1 001	Kasi. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga
15	Nora Irawati Sihite, S.STP	19791123 199810 2 001	Kasi. Penyantunan Anak Dan Lanjut Usia
16	Malanton Berutu	19711005 199303 1 005	Kasi. Kepahlawanaan, Keperintisan Dan Kesetia Kawanan Sosial
17	Sahat Maruli Tua Sianipar, A.md	19650220 198703 1 004	Kasi. Pembinaan Organisasi Sosial

## **B. Bentuk Kegiatan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan kemiskinan. Masalah sosial kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Drs. Erwin Sihotang sebagai sekretaris di Dinas Sosial mengatakan, Dinas Sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Peraturan Presiden No 15. 2010 BAB III Pasal 3 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha Mikro dan Kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Lanjut informan yang sama,

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk menekan angka kemiskinan diantaranya diadakannya berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, program tersebut yaitu

Program Keluarga Harapan (PKH), didalam PKH ini terdiri dari 3 aspek yaitu PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan, PKH bagi pemberi pendidikan, dan PKH bagi pemberi kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM)<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan bapak Bahtra Sigalingging selaku koordinator Program Keluarga Harapan Kecamatan Sidikalang mengatakan bahwa bentuk kegiatan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 aspek yaitu: <sup>33</sup>

1. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan pelaksanaan PKH kesehatan. Kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, tapi mereka juga dituntut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program PKH kesehatan ini dengan cara :

- a. Membimbing peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, seperti datang ke puskesmas atau sarana kesehatan lainnya.
- b. Melakukan verifikasi apakah peserta PKH telah memenuhi komitmen yang ditetapkan, seperti rutin memeriksa kehamilan.

---

<sup>32</sup>Erwin Sihotang, Dinas Sosial “Sekretaris Dinas Sosial” *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Sosial, 6 Agustus 2019.

<sup>33</sup>Bahtra Sigalingging, Koordinator PKH “Program Keluarga Harapan”, *Wawancara Pribadi*, Sidikalang, 6 Agustus 2019

- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada keluarga peserta PKH, seperti kesempatan dan kemudahan dalam memeriksakan kesehatan peserta PKH.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dengan bapak Bahtra Sigalingging mengatakan, yang mendapatkan PKH kesehatan yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) RTSM ditetapkan sebagai calon peserta PKH dan akan menerima bantuan komponen kesehatan jika pendataan ditemukan anggota keluarga yang terdiri dari :

- a. Ibu Hamil
- b. Ibu nifas
- c. Anak usia 0-6 tahun

Selanjutnya bapak Bahtra Sigalingging mengatakan, syarat peserta mendapatkan bantuan PKH apabila calon peserta tersebut telah menghadiri pertemuan awal dan atau menandatangani surat perjanjian mematuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp. 550.000/tahun.

Dan selanjutnya bapak Bahtra Sigalingging juga mengatakan besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan baik komponen kesehatan maupun pendidikan.

**Tabel I**

**Besaran Bantuan Kesehatan dan Pendidikan**

<b>Indeks Bantuan</b>	<b>Bantuan Per RTSM/Tahun</b>
Bantuan tetap	Rp. 550.000
Bantuan Komponen Kesehatan	
1. Ibu Hamil	Rp. 2.400.000
2. Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000
Bantuan Komponen Pendidikan	
1. SD	Rp. 900.000
2. SMP	Rp. 1.500.000
3. SMA	Rp. 2.000.000
Bantuan Komponen Kesejahteraan Sosial	
1. Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
2. Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Selanjutnya bapak Bahtra Sigalingging juga mengatakan, untuk bisa menerima hak peserta PKH harus memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan kewajiban yang dimaksud adalah :

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesehatan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.<sup>34</sup>

Lanjut informan yang sama,

Seperti yang diungkapkan bapak Bahtra Sigalingging, setiap orang yang mendapatkan bantuan program ini, harus melalui beberapa persyaratan yaitu:

**Tabel II**

**Persyaratan Peserta PKH Kesehatan**

<b>Sasaran</b>	<b>Persyaratan (kewajiban peserta)</b>
Ibu Hamil	Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan. Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Ibu Nifas	Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan
Bayi Usia 0-11 Bulan	1. Pemeriksaan kesehatan 3 kali

---

<sup>34</sup> Bahtra Sigalingging, Koordinator PKH “Program Keluarga Harapan”, *Wawancara Pribadi*, Sidikalang, 6 Agustus 2019

	<p>dalam 1 bulan pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama</li> <li>3. Imunisasi lengkap</li> <li>4. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulannya</li> <li>5. Mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6-11 bulan</li> <li>6. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>
Usia 1- 5 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imunisasi tambahan</li> <li>2. Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>4. Pemberian kapsul vit A 2 kali dalam setahun</li> </ol>
Usia 5-6 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>2. Pengukuran tinggi badan minimal</li> </ol>

	2 kali dalam setahun
	3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun <sup>35</sup>

## 2. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan pendidikan

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, khususnya bagi anak-anak dari RTSM, serta untuk mengurangi angka pekerja anak.

Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik dan memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar diharapkan PKH akan meningkatkan partisipasi pendidikan dan hal lain mendukung kebijakan pemerintah Indonesia tentang program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan (seperti sekolah, tenaga pendidik) yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH dalam komponen pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik (guru, pamong, tutor) yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pengajaran saja, mereka juga dituntut harus berkontribusi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan PKH komponen pendidikan,

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, 9 Desember.



yaitu melalui keterlibatan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak peserta PKH di kelas.<sup>36</sup>

Menurut bapak Bahtra Sigalingging, untuk mendapatkan bantuan PKH Pendidikan ini, ada sasaran dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu:<sup>37</sup>

**Table III**  
**Persyaratan Peserta PKH Pendidikan**

<b>Sasaran</b>	<b>Persyaratan</b>
Usia 6-21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SMA)	1. Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan 2. Minimal 85% kehadiran dikelas

3. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan kesejahteraan sosial

Table IV

Komponen kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2 yaitu disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas. Berikut ini adalah penjelasan tentang pelayanan kepada kesejahteraan sosial.

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, 9 Desember.

<sup>37</sup> Bahtra Sigalingging, Koordinator PKH “Program Keluarga Harapan”, *Wawancara Pribadi*, Sidikalang, 6 Agustus 2019

a. Disabilitas Berat

Pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunkan

1. Layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah (Keluarga Penerima Manfaat) KPM penyandang disabilitas berat)
2. Layanan home care (pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH)

b. Lansia 60 Tahun ke atas

1. Memastikan pemeriksaan kesehatan
2. Serta penggunaan layanan puskesmas santun lanjut usia
3. Layanan home care (pengurus merawat, memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia)
4. Day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.<sup>38</sup>

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bapak Bahtra Sigalingging mengatakan, jumlah keseluruhan bantuan yang di dapatkan oleh peserta PKH Tahun 2019 di Sidiangkat yaiu<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesejahteraan Sosisal*, 9 Desember.

<sup>39</sup> Bahtra Sigalingging, Koordinator PKH “Program Keluarga Harapan”, *Wawancara Pribadi*, Sidikalang, 6 Agustus 2019

**Tabel V**

**Jumlah Bantuan PKH Tahun 2019 di Sidiangkat**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Jumlah Bntuan Dalam Rupiah</b>
Tahap I (Januari)	138 Peserta	Rp. 230.625.000
Tahap II (April)	137 Peserta	Rp. 154.225.000
Tahap III (Juli)	137 Peserta	Rp. 158.350.000

**(Sumber Data : Kantor Dinas Sosial (PKH))**

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan peserta yang memperoleh bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan ibu Meriyati Hutahuruk selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat bermanfaat dan membantu perekonomian keluarga, karenapenghasilan yang diterima oleh suaminya sebagai petani yang terkadang tidak tetap dan dengan adanya PKH maka beban kesehatan dan pendidikan anak-anaknya menjadi terbantu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Meriyati Hutahuruk, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Maidah Berutu selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat membantu bagi perekonomian keluarganya, karena penghasilannya dari tani terkadang tidak tetap dan dengan adanya PKH maka beban kesehatan dan pendidikan anak-anaknya menjadi terbantu.<sup>41</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Relida Sinaga selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat membantu bagi perekonomian keluarganya, karena penghasilan yang diterima oleh suaminya sebagai petani yang terkadang tidak tetap dan dengan adanya PKH maka beban kesehatan dan pendidikan anak-anaknya menjadi terbantu.<sup>42</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nurhainim Solin selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat membantu bagi perekonomian keluarganya, karena penghasilan yang diterima oleh suaminya sebagai supir yang terkadang tidak tetap dan dengan adanya bantuan PKH, maka beban pendidikan anak-anaknya dan kesehatan menjadi terbantu.<sup>43</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Emeria Banurea selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat membantu bagi perekonomian keluarganya, karena penghasilan yang diterima suaminya sebagai

---

<sup>41</sup> Maidah Berutu, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

<sup>42</sup> Relida Sinaga, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

<sup>43</sup> Nurhainim Solin, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

petani yang terkadang tidak tetap dan dengan adanya PKH maka beban kesehatan dan pendidikan anak-anaknya terbantu.<sup>44</sup>

Dan selanjutnya wawancara dengan Ibu Yenni Pasaribu selaku peserta PKH, dengan adanya bantuan PKH yang diberikan ini dinilai sangat membantu bagi perekonomian keluarganya, karena penghasilan suaminya sebagai supir yang terkadang tidak tetap dan dengan adanya PKH maka beban kesehatan dan pendidikan anak-anaknya menjadi terbantu.<sup>45</sup>

### **C. Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya teliti dengan Bapak Mawardi Tumangger S.AP selaku lurah dikelurahan di Desa Sidiangkat, mengatakan hambatan yang ada dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan ini adalah pendataan jumlah masyarakat yang kurang mampu yang belum lengkap. Itu disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan data ketidakmampuan mereka kekelurahan, sehingga menjadi kendala bagi kelurahan dalam pendataan penduduk yang kurang mampu sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan program bantuan ini malah tidak mendapatkan, serta masyarakat pun masih kurang memahami dengan bantuan Program Keluarga Harapan ini.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Emeria Banurea, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

<sup>45</sup> Yenni Pasaribu, Masyarakat Sidiangkat “Penerima Bantuan PKH” *Wawancara Pribadi*, Sidiangkat, 13 Agustus 2019

<sup>46</sup> Mawardi Tumangger, Lurah Desa Sidiangkat “Hambatan Pelaksanaan PKH” *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Sihotang selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sidikalang Desa Sidiangkat mengatakan bahwa kendala yang menjadi hambatan pemerintah selama ini dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah Pendataan Kependudukan Masyarakat Miskin yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan).<sup>47</sup>

Sedangkan dari Pihak Dinas Sosial sendiri hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

1. Masalah Closing Data Masyarakat Miskin
2. Verifikasi Data untuk Anak Sekolah
3. Kelengkapan Data Masyarakat yang Kurang lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga
4. Data yang kurang lengkap dari peserta anak yang menerima bantuan pendidikan dan kesehatan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan PKH.<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Meriyati Hutahuruk salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini mengatakan hambatan yang ada pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah banyaknya warga disini yang tidak tahu akan adanya bantuan-bantuan dari

---

<sup>47</sup> Kurnia Sihotang, Pendamping PKH “Hambatan Pelaksanaan PKH” *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2019

<sup>48</sup> Erwin Sihotang, Sekretaris Dinas Sosial “Hambatan Pelaksanaan PKH” *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2019

pemerintah sehingga kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH ini menjadi tidak dapat merasakan manfaat dari bantuan PKH. Ini menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak mengurus data kemiskinannya karena mereka mengira tidak ada bantuan dari pemerintah yang akan mensejahterakan mereka.<sup>49</sup>

Sama halnya juga dengan Ibu Maidah dan Ibu Diana menurutnya hambatan yang ada pada pelaksanaan PKH ini banyaknya warga di Desa Sidiangkat ini yang tidak mengetahui akan adanya bantuan dari pemerintah dalam Bentuk Program Keluarga Harapan, sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan.<sup>50</sup>

#### **D. Solusi Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)**

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Mawardi Tumangger S.AP selaku lurah di Desa Sidiangkat mengatakan solusi yang harus dilakukan agar Program Keluarga Harapan ini dapat berjalan dengan lancar dan mensejahterakan masyarakat dihimbaungkan kepada masyarakat masyarakat miskin untuk melaporkan kepada kekelurahan data kemiskinannya sehingga akan mempermudah pemerintah dan program-programnya untuk mendapatkan data. Dan masyarakat juga harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan adanya

---

<sup>49</sup> Meriyati Hutahuruk, Masyarakat Sidiangkat “Hambatan Pelaksanaan PKH” *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

<sup>50</sup> Maida dan Diana, Masyarakat Sidiangkat “Hambatan Pelaksanaan PKH” *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

Program Keluarga Harapan dan dari pihak PKH sendiri pun harus terjun langsung kelapangan dan menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami Program Keluarga Harapan ini sehingga membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>51</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin Sihotang selaku sekretaris dinas sosial Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi mengatakan solusi yang dilakukan agar tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan Program Dinas Sosial Melalui Keluarga Harapan ini adalah:

1. Pemerintah sendiri melalui BPS (Badan Pusat Statistik) untuk dapat melakukan pendataan kembali kepada masyarakat miskin agar bantuan Program Keluarga Harapan ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sehingga terciptalah kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Masyarakat harus melengkapi data-datanya untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan.
3. Pemerintah hendaknya menambah nilai bantuan dan jumlah penerimaan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
4. Masyarakat harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan adanya program pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mawardi Tumangger, Lurah Desa Sidiangkat, "Solusi dalam Pelaksanaan PKH" *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

<sup>52</sup> Erwin Sihotang, Sekretaris Dinas Sosial, "Solusi dalam PKH" *Wawancara Pribadi*, 6 Agustus 2019



Disamping itu menurut Ibu Meriyati Hutahuruk dan Relida Sinaga solusi dalam pelaksanaan PKH ini agar dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat miskin, masyarakat harus lebih memahami akan adanya program bantuan pemerintah dalam bentuk PKH dan dari pihak pemerintah supaya makin sering kelapangan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang Program Keluarga Harapan.<sup>53</sup>

Menurut Ibu Diana Angkat dan Ibu Maidah Berutu solusi dalam pelaksanaan PKH ini agar dapat berjalan dengan baik masyarakat juga harus lebih memahami akan adanya bantuan dari Program Keluarga Harapan dan pemerintah juga supaya makin sering survei langsung kelapangan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Meriyati Hutahuruk dan Relida Sinaga, Masyarakat Sidiangkat, “ Solusi dalam PKH” *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

<sup>54</sup> Diana dan Relida, , Masyarakat Sidiangkat, “ Solusi dalam PKH” *Wawancara Pribadi*, 13 Agustus 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kehadiran dan peranan Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi ternyata memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sidiangkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin. Setelah diteliti ternyata kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan berpengaruh terhadap kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia apabila kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat rendah maka akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat oleh karena itu dengan adanya Program Keluarga Harapan masyarakat miskin di Desa Sidiangkat menjadi sangat terbantu.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan.

Adapun solusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan pendataan ulang kepada masyarakat miskin agar program bantuan ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan adanya Program Keluarga Harapan dan dari tim Program Keluarga Harapan juga harus terjun kelapangan dan memberikan arahan kepada masyarakat yang tidak paham akan adanya Program Keluarga Harapan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat miskin sehingga penerima bantuan merata
2. Diharapkan juga kepada tim Program Keluarga Harapan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih mengerti tentang Program Keluarga Harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Zubaidi, 2013 "*Pengembangan Masyarakat*", Jakarta : PT Kharisma Putra Utama

Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Munandar Soelaeman, 1986, *Ilmu Sosial Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Saditama

Dasril Arifin, Skripsi, 2013 : "*Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak*" Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim

Irma Irawan, Skripsi, 2012 : "*Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Di Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan*" Medan,IAIN SU

Fredian Tonny, 2014, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Owin Jamasy 2004,, *Keadilan Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : Belantika

Edy Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Adimata

Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Lampung : Pustaka Jaya

Ahmad Mustofa al-Maraghi, 1998, *Terjemah Tafsir al-Maraqhi*, Semarang : CV Toha Putra

Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto2017,, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabets

<https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/> (diakses 05 Juli 2015, pukul 11:40)

Parsudi Suparlan, 1995, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2015, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Munandar Soelaeman, 1986, *Ilmu Sosial Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Saditama
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2015, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group
- Permensos No 1 tahun 2018, *Program Keluarga Harapan BAB II Hak Dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH*
- Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, Jakarta
- Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, Jakarta
- Tim Penyusun PKH, 2019, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas**

Nama : Siti Abidah Lubis  
NIM : 13154032  
Tempat / tanggal lahir : Sidikalang, 25 Maret 1997  
Anak ke / dari : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara  
Alamat : Jln. Rumah Sakit Umum No.2A

### **II. Pendidikan**

1. SD Negeri 030306 Sidikalang tamat tahun 2009
2. SMP Negeri 3 Sidikalang tamat tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Sidikalang tamat tahun 2015
4. Masuk UIN-SU tahun 2015 sampai sekarang

**Lampiran Foto**



**Foto bersama Penerima Program Dinas Sosial melalui PKH**



**Foto bersama Penerima Program Dinas Sosial melalui PKH**



**Foto bersama Staf-staf Dinas Sosial Ketika Pengumpulan Data**



**Foto bersama Bapak Kurnia Pendamping PKH di Desa Sidiangkat**





**Sedang melakukan perkumpulan dengan yang mendapatkan Program Dinas Sosial**